



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-157/PK/2023 29 November 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Percepatan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota (daftar terlampir)

Sehubungan dengan proses evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD) setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 94 UU HKPD, ketentuan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
2. Sesuai dengan Pasal 187 huruf b UU HKPD, Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD, yakni pada tanggal 5 Januari 2024.
3. Selanjutnya, terkait dengan mekanisme evaluasi Raperda PDRD yang diatur dalam UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur sebagai berikut:
  - a. Raperda provinsi mengenai PDRD yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan Gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
  - b. Raperda kabupaten/kota mengenai PDRD yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
  - c. Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi/kabupaten/kota mengenai PDRD oleh Menteri Keuangan, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Raperda mengenai PDRD dengan kebijakan fiskal nasional.
4. Berdasarkan data kami, sampai dengan tanggal 28 November 2023, masih terdapat 121 pemda yang belum menyampaikan permohonan evaluasi Raperda PDRD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, 44 pemda telah menyampaikan permohonan namun kurang lengkap, dan 3 pemda yang dikembalikan permohonannya

namun belum menyampaikan kembali.

5. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mengingat Perda mengenai PDRD yang disusun berdasarkan UU 28 Tahun 2009 berlaku hanya sampai dengan tanggal 5 Januari 2024, kami menghimbau agar pemda segera melakukan percepatan penyusunan dan persetujuan DPRD atas Raperda PDRD, untuk selanjutnya menyampaikan Raperda PDRD dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ***paling lambat tanggal 10 Desember 2023***.
6. Permohonan evaluasi Raperda PDRD dapat disampaikan melalui alamat *email* [evaluasipdrd@kemenkeu.go.id](mailto:evaluasipdrd@kemenkeu.go.id) atau [evaluasipdrd@gmail.com](mailto:evaluasipdrd@gmail.com). Dalam hal pemda sebagaimana daftar terlampir telah menyampaikan permohonan evaluasi kepada Kemenkeu, dapat mengonfirmasi atau menyampaikan kembali permohonan tersebut kepada kami.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK dinomor *Whatsapp*: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-157/PK/2023

Tanggal : 29 November 2023

**Daftar Pemda belum menyampaikan permohonan evaluasi Raperda PDRD**

- 1 Provinsi Aceh
- 2 Provinsi Banten
- 3 Provinsi DKI Jakarta
- 4 Provinsi Kalimantan Utara
- 5 Provinsi Maluku
- 6 Provinsi Maluku Utara
- 7 Provinsi Papua Barat Daya
- 8 Provinsi Papua Pegunungan
- 9 Provinsi Papua Selatan
- 10 Provinsi Papua Tengah
- 11 Provinsi Sulawesi Tenggara
- 12 Provinsi Sulawesi Utara
- 13 Provinsi Sumatera Utara
- 14 Kabupaten Aceh Barat Daya
- 15 Kabupaten Aceh Singkil
- 16 Kabupaten Aceh Tamiang
- 17 Kabupaten Aceh Tengah
- 18 Kabupaten Aceh Tenggara
- 19 Kabupaten Aceh Timur
- 20 Kabupaten Asmat
- 21 Kabupaten Barito Selatan
- 22 Kabupaten Barito Utara
- 23 Kabupaten Belu
- 24 Kabupaten Bener Meriah
- 25 Kabupaten Bengkayang
- 26 Kabupaten Bengkulu Selatan
- 27 Kabupaten Bima
- 28 Kabupaten Bireuen
- 29 Kabupaten Buru Selatan
- 30 Kabupaten Buton Selatan
- 31 Kabupaten Buton Utara
- 32 Kabupaten Cirebon
- 33 Kabupaten Deiyai
- 34 Kabupaten Dogiyai

- 35 Kabupaten Ende
- 36 Kabupaten Gayo Lues
- 37 Kabupaten Halmahera Barat
- 38 Kabupaten Halmahera Timur
- 39 Kabupaten Halmahera Utara
- 40 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 41 Kabupaten Jayapura
- 42 Kabupaten Kaimana
- 43 Kabupaten Kapuas Hulu
- 44 Kabupaten Katingan
- 45 Kabupaten Kaur
- 46 Kabupaten Kediri
- 47 Kabupaten Kepulauan Selayar
- 48 Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- 49 Kabupaten Kolaka Utara
- 50 Kabupaten Konawe Kepulauan
- 51 Kabupaten Kuantan Singingi
- 52 Kabupaten Kupang
- 53 Kabupaten Kutai Kartanegara
- 54 Kabupaten Kutai Timur
- 55 Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 56 Kabupaten Lampung Utara
- 57 Kabupaten Lanny Jaya
- 58 Kabupaten Lembata
- 59 Kabupaten Majene
- 60 Kabupaten Malaka
- 61 Kabupaten Maluku Tengah
- 62 Kabupaten Mamasa
- 63 Kabupaten Mamberamo Raya
- 64 Kabupaten Mandailing Natal
- 65 Kabupaten Manggarai
- 66 Kabupaten Manggarai Timur
- 67 Kabupaten Manokwari
- 68 Kabupaten Manokwari Selatan
- 69 Kabupaten Maybrat
- 70 Kabupaten Nabire
- 71 Kabupaten Nagekeo
- 72 Kabupaten Nduga
- 73 Kabupaten Nias Barat
- 74 Kabupaten Nias Utara
- 75 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- 76 Kabupaten Padang Lawas
- 77 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 78 Kabupaten Paniai
- 79 Kabupaten Pasangkayu
- 80 Kabupaten Pegunungan Arfak
- 81 Kabupaten Pegunungan Bintang
- 82 Kabupaten Pinrang
- 83 Kabupaten Probolinggo
- 84 Kabupaten Pulau Morotai
- 85 Kabupaten Pulau Taliabu
- 86 Kabupaten Puncak Jaya
- 87 Kabupaten Raja Ampat
- 88 Kabupaten Rote Ndao
- 89 Kabupaten Sabu Raijua
- 90 Kabupaten Seram Bagian Barat
- 91 Kabupaten Serdang Bedagai
- 92 Kabupaten Solok Selatan
- 93 Kabupaten Sorong
- 94 Kabupaten Sorong Selatan
- 95 Kabupaten Sumba Tengah
- 96 Kabupaten Supiori
- 97 Kabupaten Takalar
- 98 Kabupaten Teluk Bintuni
- 99 Kabupaten Teluk Wondama
- 100 Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 101 Kabupaten Timor Tengah Utara
- 102 Kabupaten Tolikara
- 103 Kabupaten Wakatobi
- 104 Kabupaten Waropen
- 105 Kabupaten Way Kanan
- 106 Kabupaten Yahukimo
- 107 Kabupaten Yalimo
- 108 Kota Bandar Lampung
- 109 Kota Bontang
- 110 Kota Kupang
- 111 Kota Medan
- 112 Kota Palangkaraya
- 113 Kota Palopo
- 114 Kota Sawahlunto
- 115 Kota Sibolga
- 116 Kota Solok

- 117 Kota Subulussalam
- 118 Kota Tanjung Pinang
- 119 Kota Ternate
- 120 Kota Tomohon
- 121 Kota Tual

**Daftar Pemda telah menyampaikan permohonan evaluasi Raperda PDRD namun kurang lengkap**

- 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2 Provinsi Papua
- 3 Provinsi Papua Barat
- 4 Provinsi Sulawesi Barat
- 5 Kabupaten Aceh Barat
- 6 Kabupaten Bangka Selatan
- 7 Kabupaten Bangkalan
- 8 Kabupaten Banyuwangi
- 9 Kabupaten Barito Timur
- 10 Kabupaten Berau
- 11 Kabupaten Buton Tengah
- 12 Kabupaten Deli Serdang
- 13 Kabupaten Fakfak
- 14 Kabupaten Gowa
- 15 Kabupaten Indramayu
- 16 Kabupaten Intan Jaya
- 17 Kabupaten Kayong Utara
- 18 Kabupaten Keerom
- 19 Kabupaten Kepulauan Anambas
- 20 Kabupaten Kepulauan Aru
- 21 Kabupaten Kepulauan Yapen
- 22 Kabupaten Konawe Utara
- 23 Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 24 Kabupaten Lombok Tengah
- 25 Kabupaten Maluku Tenggara
- 26 Kabupaten Mimika
- 27 Kabupaten Mukomuko
- 28 Kabupaten Musi Rawas Utara
- 29 Kabupaten Pasaman Barat
- 30 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 31 Kabupaten Polewali Mandar
- 32 Kabupaten Sragen
- 33 Kabupaten Sukamara

- 34 Kabupaten Sumba Timur
- 35 Kabupaten Tabalong
- 36 Kabupaten Tana Tidung
- 37 Kota Ambon
- 38 Kota Bima
- 39 Kota Jambi
- 40 Kota Kotamobagu
- 41 Kota Makassar
- 42 Kota Padang Panjang
- 43 Kota Sorong
- 44 Kota Tanjungbalai

**Daftar Pemda yang permohonan evaluasi Raperda PDRD-nya dikembalikan namun belum mengajukan kembali**

- 1 Kabupaten Alor
- 2 Kabupaten Mamberamo Tengah
- 3 Kabupaten Mamuju Tengah

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Luky Alfirman

